

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah telah menjadi isu penting di berbagai negara dunia terutama negara-negara yang sedang membangun. Menurut The World Count (2019) manusia yang ada di dunia dapat menghasilkan sampah kurang lebih sebanyak 2.12 miliar ton per tahun. World Bank (2018) mengemukakan bahwa apabila tidak ada tindakan serius dalam mengatasi permasalahan sampah maka dapat diprediksi bahwa produksi sampah dan limbah global akan mengalami peningkatan di tahun 2050 sebanyak 70% atau sekitar 3,4 miliar ton sampah per tahun. Jumlah ini dapat mengalahkan jumlah ikan yang ada di lautan (Green Universitas Indonesia, 2021).

Negara-negara maju menganggap sampah sebagai bagian yang penting dari kegiatan industri pengelolaan dan pemanfaatan kembali. Sebaliknya, di negara-negara yang masih berkembang mengalami kesulitan untuk menangani permasalahan sampah. Menurut World Bank, anggaran yang dikeluarkan oleh setiap negara untuk mengelola sampah mencapai 20 hingga 50 persen dari total biaya yang digunakan untuk pembangunan (Setiawan, 2021).

World Health Organization (WHO) dalam Hasibuan dan Syafaruddin (2021:1) mendefinisikan sampah sebagai suatu materi yang tidak digunakan lagi, tidak dipakai, tidak disenangi ataupun sesuatu yang dibuang dan berasal dari kegiatan manusia sehari-hari. Sampah dapat diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun sampah yang

dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik (Undang Undang Nomor 18 2008).

Keberadaan sampah sendiri tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari, dimana ada manusia di situ pula ada sampah. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan perekonomian serta perluasan daerah dapat mengakibatkan jumlah sampah dari penduduk, rumah tangga, badan hukum hingga kegiatan usaha bertambah. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi suatu masalah karena berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kebersihan dan keindahan lingkungan (Yadi Hartono, Dwi Mardhia, Ieke Wulan Ayu, 2020:4).

Berbagai permasalahan kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat dapat muncul apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Penyakit yang muncul akibat sampah seperti diare, DBD, tifus dan lain sebagainya. Sedangkan permasalahan lingkungan yang terjadi akibat sampah adalah pencemaran udara yang dapat mengganggu saluran pernapasan dan pencemaran air yang disebabkan oleh air lindi hasil timbunan sampah yang masuk ke tanah sehingga air tanah dan atau sumber air menjadi tercemar (Sholihah, 2020:1-2).

Besarnya jumlah penduduk dan aktivitas yang beranekaragam di kota-kota besar Indonesia seperti Kota Jakarta mengakibatkan timbulnya persoalan mengenai pelayanan prasarana perkotaan yaitu permasalahan sampah. Di kota-kota besar Indonesia, diperkirakan hanya 60% sampah yang diangkut menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan operasi utamanya yaitu pengurukan atau *landfilling*. Banyaknya jumlah sampah yang tidak terangkut tidak terdeteksi secara

sistematis. Hal tersebut dikarenakan perhitungan sampah berdasarkan ritasi truk menuju TPA. Sedangkan sampah yang ditangani oleh masyarakat, yang tececer dan dibuang ke badan air jarang diperhitungkan (Damanhuri, 2010:8).

Riset dari *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) menemukan bahwa di Negara Indonesia sebanyak 24% sampah tidak terkelola. Hal tersebut berarti dari 65 juta ton sampah yang diproduksi setiap harinya, sekitar 15 juta ton tidak tertangani sehingga menyebabkan pengotoran pada ekosistem dan lingkungan. Kemudian sebanyak 7% sampah didaur ulang dan 69% lainnya berakhir di TPA. Adapun jenis sampah yang banyak dihasilkan yaitu sampah organik sebanyak 60%, sampah plastik 14%, sampah kertas 9%, metal 4,3% serta kaca, kayu dan bahan lain 12,7% (Litbang Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020) mengungkapkan bahwa sampah yang diproduksi oleh Indonesia pada tahun 2020 diprediksi mencapai 67,8 juta ton. Dari jumlah tersebut berarti penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta, menghasilkan sampah sekitar 185.753 ton per hari atau sampah yang diproduksi oleh tiap penduduk sekitar 0,68 kg/hari. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah sampah nasional jumlahnya mencapai 64 juta ton dari 267 penduduk yang kemudian berkontribusi menambah timbunan sampah di TPA (Setiawan, 2021).

Riset dari *Sustainable Waste Indonesia* pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari total sampah, hanya sekitar 3% sampah yang dilakukan daur ulang.

Sedangkan sisanya berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA (Analisis Kata Data, 2019). Pemilahan sampah belum dilakukan secara optimal oleh masyarakat Indonesia. Hasil dari survei *Katadata* menunjukkan bahwa masyarakat yang memilah sampah baru sekitar 49%. Survei tersebut dilakukan terhadap 354 keluarga yang ada pada lima kota besar di Indonesia. Meskipun persentase masyarakat dalam memilah sampah terlihat besar, namun cara pemilahan sampah masih menjadi permasalahan. Dari 174 responden yang memilah sampah, kebanyakan dari mereka melakukan pemisahan sampah menjadi sampah yang berjenis basah dan sampah kering. Sedangkan pemilahan sampah yang berjenis organik dan sampah jenis anorganik hanya berkisar 18,4% saja. Pemilahan yang dilakukan setidaknya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu sampah organik, anorganik serta B3 (Tim Publikasi *Katadata*, 2019).

Pengelolaan mengenai permasalahan sampah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan yang ke 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Pada target ke 12.5 dijelaskan bahwa pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali (Bappenas, 2017). Target penting di dalam mencapai tujuan ini adalah melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara efisien dan cara membuang sampah beracun juga polutan. Selain itu, juga mendorong aktivitas pada industri, bisnis serta konsumen melakukan daur ulang dan pengurangan terhadap sampah. Kegiatan tersebut memiliki kesamaan kepentingan

dengan mendorong negara-negara yang masih berkembang untuk menerapkan perilaku konsumsi berkelanjutan di tahun 2030.

Permasalahan sampah menjadi suatu hal yang perlu diselesaikan, oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Aturan tersebut diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah hendaknya dilakukan dengan cara terpadu dan komprehensif dari hulu hingga ke hilir sehingga bermanfaat bagi masyarakat baik secara ekonomis, secara kesehatan, aman untuk lingkungan dan mampu merubah perilaku yang ada pada masyarakat. Pada tingkat daerah, Undang-Undang mengenai pengelolaan sampah tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda (Irmawan et al., 2019).

Selain itu, pengelolaan sampah juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya di dalam Peraturan Presiden tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT), pemerintah menargetkan untuk mengurangi sampah sebanyak 30% dan menangani sampah sebanyak 70% hingga tahun 2025 (Presiden Republik Indonesia 2009,2017 dalam Sudirman (2019)).

Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.015,10 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.054.362 jiwa (BPS Boyolali, 2020). Setiap tahunnya, produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali mengalami

peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya perumahan dan berbagai industri yang membuka investasi di Kabupaten yang dikenal dengan sebutan “Kota Susu” tersebut. Berikut merupakan data mengenai jumlah timbulan sampah yang ada di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2021.

Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2021

Tahun	Timbulan sampah harian (ton)	Timbulan sampah tahunan (ton)
2019	265,90	97.052,73
2020	287,93	105.094,61
2021	290,85	106.159,34

Sumber: Data telah diolah kembali dari SIPSN (2022a)

Dari tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa timbulan sampah yang ada di Kabupaten Boyolali dari tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlahnya meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah sampah-sampah tersebut dipengaruhi oleh perilaku konsumsi yang berasal dari sumber dan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali.

Di Kabupaten Boyolali, pengelolaan mengenai persampahan telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dimana pengelolaan sampah dilaksanakan dengan cara pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah juga diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan arah kebijakan berupa pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, dirumuskan beberapa masukan terkait dengan program dan kegiatan prioritas yang diindikasikan menimbulkan dampak terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dimana salah satu programnya yaitu pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu atau TPST (RPJMD Kabupaten Boyolali, (2021). Saat ini, Kabupaten Boyolali telah memiliki TPST aktif yang tersebar di beberapa wilayah dan satu TPA yang berada di Winong.

Tabel 1.2 Jumlah Sampah Masuk di TPA Winong Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2021

Tahun	Sampah masuk (ton/tahun)	Sampah masuk landfill (ton/tahun)
2019	25,320.05	22,108.05
2020	28,156.10	23,714.05
2021	30,868.05	26,426.00

Sumber: Data telah diolah kembali dari SIPSN (2022b)

Dari tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah sampah masuk di TPA Winong Kabupaten Boyolali dan sampah yang masuk *landfill* dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan setiap tahun. Dikutip dari *solopos.com* (2021) berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun 2021, dari total 100% sampah yang diproduksi, hanya 40% sampah yang masuk ke TPA Winong, Boyolali. Diperkirakan 60% sampah lainnya yang tidak masuk ke TPA Winong dikelola oleh desa dan warga masyarakat melalui program bank sampah

dan sisanya dibakar, dikubur, dibuang sembarangan dan belum terdeteksi persennanya.

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali mengalokasikan anggaran guna melaksanakan 11 program dan 44 kegiatan. Salah satu program yang dianggarkan yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Program tersebut didukung oleh lima kegiatan, antara lain penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, pengembangan teknologi pengolahan persampahan, sosialisasi pengelolaan sampah, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, 2018).

Aktivitas pembangunan ekonomi yang meningkat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan menyebabkan peningkatan jumlah sampah. Studi penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali dan belum ada yang melakukan penelitian mengenai implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

Butuh adalah salah satu dari 261 desa yang ada di Kabupaten Boyolali. Desa Butuh memiliki wilayah seluas 1,9449 km² dengan jumlah penduduknya sebanyak 2.575 jiwa serta kepadatan penduduk 1.323 jiwa/km² (BPS Boyolali, 2020). Desa Butuh merupakan salah satu kawasan industri dimana di desa ini banyak berdiri

pabrik-pabrik. Berdirinya pabrik-pabrik tersebut kemudian diikuti dengan pembangunan kos, ruko-ruko serta tempat makan yang ada di sekitar pabrik. Dengan demikian kepadatan penduduk di desa ini selain dari jumlah penduduk asli juga ditambah dengan penduduk pendatang seperti para perantau yang berasal dari luar daerah untuk bekerja di industri yang ada di Desa Butuh tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut mengakibatkan jumlah sampah juga mengalami peningkatan, sebagaimana nampak pada gambar berikut ini.



Gambar 1. 1 Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dusun 1 Desa Butuh

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020

Volume sampah di Desa Butuh mengalami peningkatan setiap harinya. Sebagian warga masyarakat Desa melakukan pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Desa Butuh. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh warga masyarakat dan ditampung tersebut diangkut dua hari sekali oleh mobil yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Boyolali menuju ke TPA sebanyak satu bak sampah penuh, dengan volume sampah setiap baknya mencapai 1 ton. Jumlah sampah yang dihasilkan dalam satu bulan bisa mencapai 15 bak sampah.

Secara umum, pengelolaan sampah di Desa Butuh telah diatur di dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan. Pada BAB IV tentang kebersihan lingkungan pasal (1) dijelaskan bahwa “*setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan*”. Kebersihan lingkungan tersebut termasuk kewajiban bagi setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan untuk melakukan pengelolaan sampah/ kotoran yang mereka hasilkan.

Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan lingkungan yang selanjutnya disingkat K4L adalah program, upaya, kegiatan, yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan Desa Butuh yang bersih, indah, tertib dan sehat. Dengan adanya program desa tentang kebersihan termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sampah maka implementasi perlu dilaksanakan sesuai dengan program tersebut. Salah satu program desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Butuh dalam mengatasi persampahan adalah membuat TPS yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara sampah dari sumbernya.

Di dalam administrasi publik, sampah menjadi suatu permasalahan penting yang berkaitan dengan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sampah pemerintah mengambil kebijakan tentang pengelolaan sampah. Salah satu proses pada kebijakan publik adalah implementasi. Adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah tingkat pusat maupun tingkat daerah termasuk pedesaan, maka aturan tersebut perlu diimplementasikan agar permasalahan sampah dapat teratasi. Di dalam implementasi kebijakan tersebut, terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Penelitian ini akan melihat implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Said., dkk (2015) menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau pada faktor komunikasi oleh Dinas Kebersihan terhadap pelaksanaan program belum berjalan dengan optimal. Selain itu, sumber daya berpengaruh besar terhadap tercapai atau tidaknya kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau. Para pelaksana memiliki komitmen untuk mensukseskan keberjalanan program. Belum ada kejelasan *Standart Operasional Prosedur* dalam pelaksanaan program.

Studi penelitian terdahulu oleh Sinaga (2017) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru telah menjadwalkan waktu pembuangan sampah dan melayani pengelolaan persampahan. Namun pada implementasinya, tindakan tersebut belum maksimal dikarenakan infrastruktur yang masih minim dan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat disebabkan tidak ada komunikasi dari pemerintah kepada warga masyarakat. Penelitian tersebut melihat implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Nurlina., dkk (2021) yang melihat implementasi kebijakan pengelolaan sampah dari 3 faktor yaitu, isi atau konten kebijakan, implementor dan kelompok sasaran serta lingkungan kebijakan. Temuan dari penelitian tersebut adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pelayanan sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan komunikasi kepada kelompok sasaran kebijakan masih kurang. Kapabilitas, kompetensi dan konsistensi dari para pelaksana dalam menjalankan tugas juga masih kurang. Selain itu, kelompok sasaran masih bersifat tradisional sehingga sulit diberi pemahaman mengenai pengelolaan sampah sehingga tujuan dari kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Dukungan publik seperti respon masyarakat terkait partisipasi dalam mengelola sampah dan mengikuti sosialisasi masih sangat kurang

Program desa dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Adapun program yang di laksanakan yaitu sampah/limbah pengelolaan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, pengolahan sampah, penyediaan wadah sampah dan larangan membuang sampah sembarangan (Peraturan Desa Butuh No 5 Tahun 2020). Apabila tata kelola sampah mengikut pada kebijakan dan program yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pengelolaan sampah di desa dapat berjalan dengan baik. Melihat permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Desa Butuh tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ***“Implementasi Program Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali”***.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau dipengaruhi oleh faktor komunikasi dari Dinas Kebersihan yang belum maksimal. Selain itu, belum terdapat *Standart Operating Procedur* (SOP) dalam pelaksanaan program.
2. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum maksimal dikarenakan minimnya infrastruktur dan tidak adanya komunikasi dari pemerintah sehingga partisipasi masyarakat kurang.
3. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pelayanan sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan komunikasi dengan kelompok sasaran yang kurang. Selain itu, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana serta partisipasi dan keikutsertaan sosialisasi dari masyarakat masih sangat kurang.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya implementasi kebijakan dan kepentingan pada masa mendatang serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk masukan dan pelengkap dasar-dasar teori mengenai implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Selain itu juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

2. Bagi Pihak Instansi

Sebagai bahan untuk masukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam perumusan kebijakan dan implementasinya, terutama pada program desa dalam pengelolaan sampah untuk masa kini maupun pada masa mendatang.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dan pertimbangan untuk menguji permasalahan yang ada pada penelitian yang dilakukan. Studi maupun penelitian sejenis telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti telah menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Hasil Penelitian (4)
1	Rungky Lecesnawati dan Indah Prabawati (2018)	Implementasi Program Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Di Rt 03 Rw 03 Jambangan Kota Surabaya	(1) Komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan atau <i>workshop</i> secara rutin 2 (dua) bulan sekali dengan fasilitator lingkungan terhadap kader pengelola sampah untuk <i>sharing</i> mengenai pengelolaan

(1)	(2)	(3)	(4)
			sampah.
			(2) Sumber daya, terdapat tiga bagian dalam sumber daya yaitu:
			a. Sumber daya manusia, program ini didukung oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, RT 03 Jambangan, dan Kelompok Informasi Masyarakat Jambangan Hijau serta para tokoh masyarakat setempat.
			b. Sumber daya anggaran, anggaran yang digunakan berasal dari masyarakat. Pemerintah hanya memberi bantuan stimulus bersumber dari dana awal untuk menyelenggarakan perlombaan.

(1)	(2)	(3)	(4)
			c. Sumber daya sarana dan prasarana, adapun sarana prasarana yang ada yaitu:ruangan, alat pemisah sampah, komposer, dan bak sampah.
		(3) Disposisi, pegawai dan kaderisasi dipilih dengan cara pembentukan tim dan panitia pelaksana seperti tim penyuluh, kader-kader, serta para tokoh lingkungan yang berada di daerah tersebut dengan melibatkan ibu-ibu PKK.	
		(4) Struktur Birokrasi, mengacu pada UU RI No 28 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014. Kegiatan operasional dibentuk dan	

(1)	(2)	(3)	(4)
			dibimbing oleh pemerintah melalui <i>workshop</i> yang dipantau oleh kader daerah.
2	Ulfa Azizah dan AUFARUL MAROM (2016)	Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang	<p>(1) Implementasi program pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang sudah berjalan dengan baik namun belum optimal.</p> <p>(2) Adapun kendala yang dihadapi oleh implementor dalam implementasi program pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Sambiroto yaitu kendala yang bersifat teknis. Kemudian terdapat kendala berupa penunggakan iuran yang berimbas pada kurangnya dana. Selain itu juga terdapat kendala kurang sumber daya.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Muhammad Solihin dan Rahmayadi Mulda (2019)	Implementasi Program Pengurangan Sampah di Kota Batam Tahun 2018	<p>(1) Indikator input</p> <p>a. Peraturan, belum adanya peraturan turunan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Batam.</p> <p>b. Organisasi pelaksana, program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sub bagian pengurangan sampah, Unit Bank Sampah yang menjadi mitra dari Dinas Lingkungan Hidup, Nasahan Bank Sampah Dan TPS-3R.</p> <p>c. Sumber daya, minimnya jumlah sumber daya manusia juga organisasi unit pengelolaan bank sampah dan TPS-3R.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			(2) Indikator output
			a. Akses, pengurangan sampah di Kota Batam dilaksanakan oleh beberapa aktor, antara lain rumah tangga, unit bank sampah pada tiap kelurahan, dan TPS-3R. Namun, sampah-sampah yang berasal dari sumber tidak dilakukan pemilahan terlebih dahulu, karena rumah tangga masih menggunakan satu jenis tempat sampah dan mengandalkan bank sampah.
			b. Frekuensi, pengangkutan sampah oleh petugas menuju Bank Sampah telah sesuai dengan SOP yang ada, namun terbatasnya

(1)	(2)	(3)	(4)
			pick up maka dibuat jadwal dan tonase yang sudah ditentukan.
			c. Cakupan, pengurangan sampah di Kota Batam telah mencakup di 12 kecamatan, namun masih terdapat beberapa unit Bank Sampah yang kinerjanya belum optimal.
			d. Bias, dalam pelaksanaan program pengurangan sampah belum ada peraturan turunan, fasilitas untuk pemilahan sampah masih kurang, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.
			e. Ketepatan layanan, layanan pengurangan sampah tepat dilakukan karena vital bagi

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>masyarakat setempat.</p> <p>(3) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program pengurangan sampah pada umumnya terkendala oleh sumber daya yang masih minim, terutama pengelola TPS-3R dan unit Bank Sampah yang tidak memiliki insentif tetap dari pemerintah.</p>
4	<p>Naili Salamah, Soesilo Zauhar, M.Chazien Ulum (2015)</p>	<p>Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Melalui Pemanfaatan Gas Metana (Studi Di Tempat</p>	<p>(1) Implementasi program telah dilaksanakan dengan baik, hal itu ditunjukkan dengan adanya keikutsertaan warga masyarakat dalam pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang.</p> <p>(2) Alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Kota Malang telah terorganisir dengan baik</p> <p>(3) Berkaitan dengan efektivitas,</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		Pembuangan Akhir Supit Urang Kota Malang)	pengelolaan gas metana sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, akumulasi dari pemanfaatan gas metana belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kota Malang
			(4) Anggaran yang digunakan untuk pengelolaan gas metana sepenuhnya berasal dari pemerintah, hal tersebut dikarenakan belum adanya keterlibatan dari pihak swasta.
5	Ratna Ilmi Anggraini dan Indah Prabawati (2017)	Implementasi Program Zero Waste Di Kabupaten Sidoarjo	Implementasi program <i>zero waste</i> telah berjalan dengan baik namun masih diperlukan perbaikan. Kemudian diperlukan sikap nyata dari remaja untuk memberikan perubahan. Pendekatan yang digunakan adalah Van Meter dan Van Horn:

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>a. Ukuran dan tujuan kebijakan, adapun yang menjadi ukuran kebijakan yaitu jumlah peserta dan masyarakat yang mengikuti kegiatan mencapai 1000 orang, namun jumlah tersebut tidak selalu sama dikarenakan faktor jarak dan cuaca.</p> <p>b. Sumber daya, dalam pelaksanaan program <i>zero waste</i> terdapat sumber daya, yang mumpuni baik dari manusia, waktu, anggaran, dan sarana prasarana.</p> <p>c. Karakteristik organisasi, karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana program <i>zero waste</i> sudah</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>sesuai dengan peran serta tanggung jawab yang diberikan</p> <p>Sikap pelaksana, sikap yang dimiliki para pelaksana program <i>zero waste</i> tercermin dari antusiasme dan komitmen.</p>
			<p>a. Komunikasi organisasi, terdapat dua bentuk komunikasi pada program <i>zero waste</i>, yaitu komunikasi formal dan non formal. Komunikasi dilakukan untuk mengurangi adanya kesalahpahaman.</p>
			<p>b. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, pada program <i>zero waste</i> dukungan lingkungan ekonomi dari kreatifitas</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>warga masyarakat dalam pemanfaatan sampah. Selain itu, dukungan ekonomi juga berasal dari APBD Kabupaten Sidoharjo. Kemudian dukungan dari lingkungan sosial yaitu partisipasi dari warga masyarakat dan peserta, namun pelaksanaan program kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial, hal tersebut dikarenakan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di sekitar masih rendah. Selanjutnya untuk lingkungan politik, program tersebut mendapatkan dukungan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			politik dari Bupati, Camat serta Kepala Desa .
6	R. Lalitha S. Fernando (2019)	Solid Waste Management of Local Governments In The Western Province of Sri Lanka: An Implementation Analysis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa remunerasi dan fasilitas lainnya seperti staf, komitmen, motivasi dan dukungan dari pimpinan politik, kontribusi dari masyarakat dan dunia usaha secara signifikan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah padat. Pengelolaan sampah padat belum berhasil pada tahap pelaksanaannya karena beberapa masalah administrasi seperti lahan yang tidak mencukupi untuk pembuangan akhir, pengomposan dan daur ulang. Selain itu, implementasi pengelolaan sampah padat masih kurang kendaraan, kurangnya instrumen dan teknologi modern, kerangka

(1)	(2)	(3)	(4)
			peraturan yang buruk, produktivitas dan kuantitas tenaga kerja yang rendah serta kurangnya kesadaran penduduk dan campur tangan politik yang tidak tepat.
7	Ishfaq Showket Mir, Puneet Pal Singh Cheema, Sukhwinder Pal Singh (2021)	Implementatio n Analysis of Solid Waste Management In Ludhiana City of Punjab	Penelitian ini menemukan berbagai kendala keuangan, sumber daya manusia, logistik politik yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah padat di kota. Data dianalisis menggunakan analisis kinerja kepentingan untuk mengevaluasi program-program yang perlu ditangani untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kota. Pada tahap implementasi pengelolaan persampahan, kendala administratif seperti kurangnya teknologi dan peralatan modern, kurangnya lahan untuk

(1)	(2)	(3)	(4)
			pembuangan serta kurangnya program pengelolaan sampah terpadu.
8	Muhammad Amir & Rola Pola Anto (2018)	A Study Policy Implementation of Waste Management in Konawe Regency Indonesia	<p>Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kendala di dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe yaitu dari aspek fasilitas masih kurang kondisi wilayah kerja sangat luas, kesadaran, partisipasi dan pengetahuan dari masyarakat tentang pengelolaan sampah juga masih kurang. Temuan penelitian membuktikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas, sehat dan bersih belum terwujud seperti yang diharapkan. Pengelolaan sampah perlu kerja keras.</p>

Dari tabel 1.3 tersebut dapat diketahui bahwa telah dilakukan penelitian terdahulu yang membahas tentang program pengelolaan sampah. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu peneliti melakukan penelitian tentang implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edwards III yaitu menganalisis implementasi dari faktor komunikasi, sumber daya, diposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Rahman (2017:19-20) mengemukakan bahwa administrasi publik yaitu mengorganisir dan melaksanakan koordinasi terhadap sumber daya juga para personel publik untuk melakukan formulasi, implementasi serta pengelolaan keputusan pada suatu kebijakan publik yang diambil. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa administrasi publik dapat dimaknai sebagai seni dan ilmu melakukan pengaturan terhadap “*public affairs*” dan menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan sebelumnya. Administrasi Publik sebagai ilmu yang memiliki tujuan untuk pemecahan terhadap suatu permasalahan publik dengan melakukan perbaikan baik pada organisasi, sumber daya manusia maupun anggaran.

Safritz dan Russel dalam Rahman (2017:20-21) mendefinisikan administrasi publik ke dalam 4 kategori. *Pertama*, kategori politik yaitu administrasi publik dilihat sebagai apa yang pemerintah kerjakan baik langsung atau tidak langsung, juga termasuk pada salah satu tahapan pembuatan kebijakan, implementasi dari kepentingan publik serta suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan bukan individu. *Kedua*, kategori hukum yaitu administrasi publik dilihat sebagai regulasi maupun penerapan hukum. *Ketiga*, berdasarkan kategori manajerial dimana administrasi publik berperan sebagai fungsi eksekutif pemerintahan atau spesialisasi manajemen. *Keempat*, kategori mata pencaharian yaitu administrasi publik dapat dilihat sebagai profesi.

Menurut Pasolong (2007) administrasi publik merupakan bentuk dari kerjasama yang dilakukan sekelompok orang maupun lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Kemudian Ibrahim menjelaskan bahwa administrasi publik adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan manajemen oleh pemerintah seperti perencanaan, mengorganisasikan, pelaksanaan serta melakukan pengawasan dengan mekanisme kerja dan sumber daya manusia yang mendukung (Revida dkk, 2020:3).

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari administrasi publik yaitu bentuk kerja sama oleh sekelompok orang maupun lembaga yang di dalamnya terdapat tugas-tugas untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui kebijakan dan

manajemen pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan publik serta mencapai tujuan negara.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Dalam bahasa Yunani, paradigma yaitu *paradigm* yang berarti pola atau contoh. Friedrichs dalam (Revida dkk, 2020:7) memberikan batasan bahwa paradigma dapat diartikan sebagai suatu pandangan mendasar terhadap suatu disiplin ilmu yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang dipelajari. Kemudian, Ritzer juga mengemukakan bahwa paradigma dapat didefinisikan sebagai pandangan mendasar dari disiplin ilmu tentang pokok permasalahan yang sudah semestinya dipelajari pada salah satu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian pengertian dari paradigma administrasi publik adalah model atau pola mengenai *focus* dan *locus* atau kedudukan dari administrasi publik (Revida dkk, 2020:7).

Adapun tahapan-tahapan dari paradigma administrasi publik adalah sebagai berikut:

1. Paradigma I: Dikotomi Politik-Administrasi Publik (1900-1926)

Paradigma ini dipelopori oleh Leonard D. White, di dalam paradigma ini terdapat dwifungsi administrasi publik yaitu politik dan administrasi. Locus dari administrasi publik yaitu bekerja setelah politik bekerja atau melakukan perumusan kebijakan. Sedangkan fokusnya yaitu berada naungan politik. Di dalam paradigma ini, antara politik dengan administrasi saling membutuhkan satu sama lain seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

2. Paradigma II: Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927-1937)

Paradigma ke II ini menekankan pada fokus dari administrasi publik, yaitu penerapan prinsip-prinsip di dalam administrasi seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, disiplin, kerjasama, koordinasi, dan lain sebagainya. Paradigma ke II ini dipelopori oleh FW. Taylor dengan 4 prinsip dasar administrasi publik yaitu pengembangan ilmu manajemen, seleksi pegawai, pendidikan dan pengembangan pegawai, dan kerjasama antara atasan dan bawahan. Prinsip tersebut kemudian dikembangkan oleh Henry Fayol, Leonard D. White, dll.

3. Paradigma III: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ini dipelopori oleh Chester I Barnard, Dwight Waldo, Herbert Simon, dll. Pada paradigma ini, administrasi publik merupakan bagian dari ilmu politik yakni sebagai eksekutif dari politik. Pelaksanaan administrasi publik tidak bebas nilai dan dapat diintervensi lingkungan.

4. Paradigma IV: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ke IV ini dipelopori oleh Herbert Simon, Keith Henderson, James March. Pada paradigma ini, administrasi publik kebalik menjadi ilmu administrasi dan mulai menerapkan teori-teori organisasi dan ilmu manajemen.

5. Paradigma V: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)

Pelopor paradigma ke V adalah Amitai Etzioni, Gerald Caiden, dll. Pada paradigma ini administrasi publik menjadi administrasi publik dengan menjalankan

prinsip dan fungsi administrasi publik. Di dalam paradigma ini menggunakan teori organisasi dan manajemen publik, politik ekonomi publik, analisis dan proses pembuatan kebijakan publik.

6. Paradigma Old Public Administration (OPA)

Paradigma ini dipelopori oleh FW Taylor, Henry Fayol, Woodrow Wilson. *Old Public Administration* juga disebut dengan administrasi publik klasik dimana menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi administrasi. *Old Public Administration* berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang berorientasi pekerjaan.

7. Paradigma New Public Administration (NPA)

Merupakan paradigma perubahan dari *Old Public Administration*. Paradigma ini mulai menggagas *people centered* dan muncul sejak tahun 1960-1970. Selain mengutamakan efektivitas dan efisiensi, juga menerapkan keadilan sosial dan sikap menghargai harkat martabat manusia sebagai pelaksana administrasi publik.

8. Paradigma New Public Management (NPM)

Paradigma ini muncul sejak tahun 1992 dimana Osborne dan Gaebler mencetuskan perlunya *entrepreneurial governance* atau *reinventing government* dengan sepuluh prinsip dasar administrasi publik.

9. Paradigma New Public Service (NPS)

Paradigma ini muncul akibat kritik terhadap *New Public Management* dengan alasan *New Public Management* tidak dapat menjalankan prinsip pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Kritik tersebut disampaikan oleh Kamensky (1996) yaitu beberapa birokrat lebih cenderung mementingkan diri mereka sendiri daripada kepentingan bersama atau umum dan melakukan kolaborasi untuk mencapainya. Tujuan dari paradigma *New Public Service* yakni mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

1.5.3 Kebijakan Publik

Dikutip oleh Leo Agustino (2008) dalam buku Taufiqurakhman (2014:2), Carl J. Federick mengemukakan bahwa pengertian kebijakan yaitu suatu rangkaian dari kegiatan yang diusulkan baik oleh perorangan atau individu, kelompok maupun pemerintah pada lingkungan yang telah ditetapkan guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan serta terdapat hambatan dan kesempatan mengenai pelaksanaan kebijaksanaan. Kemudian Iskandar dalam Ramdhani & Ramdhani (2017) memberikan definisi kebijakan sebagai rangkaian dari rencana atau program, aksi, keputusan, aktivitas serta sikap para aktor untuk melakukan atau memilih untuk tidak melakukan tindakan dalam penyelesaian masalah. Penetapan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting pada organisasi untuk mencapai tujuan.

Terdapat beberapa teori kebijakan yang dikutip oleh Uddin B. Sore dan Sobirin (2017:3) dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik”, Ealau dan Pewitt (1973) menjelaskan pengertian kebijakan merupakan suatu ketetapan yang

diberlakukan dengan ciri terdapat perilaku yang konsisten dan dilakukan secara berulang oleh pembuat kebijakan ataupun pelaksana kebijakan. Titmuss (1974) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan prinsip-prinsip untuk mengatur tindakan serta mengarah pada pencapaian tujuan. Sedangkan Edi Suharto (2008) mendefinisikan kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip sebagai arah guna melakukan tindakan yang dibuat sesuai rencana dan sesuai konsisten untuk pencapaian suatu tujuan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan pengertian dari kebijakan yaitu rangkaian program maupun kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh para pembuat keputusan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Beberapa pengertian kebijakan publik dalam buku Winarno (2002:15) yang berjudul “Teori dan Proses Kebijakan Publik”, secara luas Robert Eyestone menjelaskan bahwa pengertian dari kebijakan publik yaitu hubungan antara pemerintah dengan lingkungan disekitarnya. Kemudian Thomas R. Dye memberikan batasan mengenai kebijakan publik, ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang telah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan maupun tidak melakukan tindakan. Selanjutnya Richard Rose memberikan saran bahwa kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan yang kurang lebihnya memiliki hubungan dan konsekuensi terhadap pihak yang bersangkutan daripada sesuatu keputusan tersendiri.

Anderson dalam Winarno (2002:16-19) memberikan definisi dari kebijakan publik yaitu tindakan yang dipilih atau ditetapkan oleh seorang maupun beberapa aktor guna mengatasi permasalahan. Ia memberikan beberapa implikasi mengenai

konsep kebijakan publik. *Pertama*, orientasi dari kebijakan publik adalah maksud dan tujuan yang telah direncanakan para aktor yang berada pada sistem politik. *Kedua*, kebijakan publik sebagai pedoman atau arah dari pejabat pemerintah bukan keputusan sendiri. Selain itu, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan ketetapan undang-undang akan tetapi juga pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan yaitu tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengaturan perdagangan, laju inflasi, dan melakukan promosi perumahan rakyat bukan suatu tindakan menjadi keinginan dari pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik bisa saja positif ataupun bersifat negatif. Bersifat positif apabila kebijakan tersebut memiliki kejelasan dari pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan. Bersifat negatif apabila kebijakan tersebut telah mencakup keputusan-keputusan dari pejabat di dalam pemerintahan akan tetapi tidak ada tindakan yang diambil untuk melakukan sesuatu terhadap permasalahan yang membutuhkan keterlibatan dari pemerintah. Dengan demikian kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan maupun keputusan yang telah dipilih oleh para pejabat pemerintah untuk melakukan penyelesaian terhadap suatu permasalahan publik.

1.5.4 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian dari aktivitas intelektual dalam proses kegiatan yang sifatnya politis. Aktivitas politis yang dilaksanakan mencakup beberapa kegiatan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas berupa perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan merupakan aktivitas

yang sifatnya intelektual. Pakar dari kebijakan publik, James Anderson dalam Subarsono (2005:12) menjelaskan bahwa tahapan dari proses administrasi publik, antara lain:

- a) Formulasi masalah (*problem formulation*). Apakah permasalahannya? Apa yang menjadikan permasalahan tersebut menjadi permasalahan kebijakan? Bagaimana cara memasukkan permasalahan tersebut ke dalam agenda pemerintah?
- b) Formulasi kebijakan (*formulation*). Bagaimana cara untuk mengembangkan berbagai pilihan yang telah dipilih untuk melakukan pemecahan masalah tersebut? siapa yang berpartisipasi di dalam formulasi kebijakan?
- c) Penentuan kebijakan (*adoption*). Bagaimana berbagai alternatif yang dipilih ditetapkan? Keriteria atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi? Siapkah pelaksana dari kebijakan? Bagaimana proses dalam melaksanakan kebijakan? Apa saja isi dari kebijakan yang ditetapkan?
- d) Implementasi (*implementation*). Siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dipilih?
- e) Evaluasi (*evaluation*). Bagaimana cara mengukur dampak dari suatu kebijakan? Siapa saja yang melakukan evaluasi terhadap kebijakan? Konsekuensi apa yang diperoleh dari adanya evaluasi kebijakan? Apakah terdapat tuntutan untuk melakukan suatu perubahan atau pembatalan?

Kemudian Michael Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2005:13) menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) tahapan dalam proses kebijakan publik, antara lain:

- a) Penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan proses dimana permasalahan publik menjadi perhatian dari pemerintah yang kemudian disusun menjadi agenda.
- b) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perumusan terhadap pilihan-pilihan.
- c) Pembuatan kebijakan (*decision making*), merupakan proses yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan.
- d) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- e) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), merupakan proses yang dilakukan untuk memonitoring dan memberikan penilaian kerja dari suatu kebijakan yang dipilih.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

1.5.5.1 Pengertian implementasi kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh individu maupun sekelompok orang pada organisasi pemerintah ataupun pihak swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui keputusan kebijakan. Kemudian Merrile S. Grindle dalam Maolani & Ishak (2018) mengemukakan

bahwa implementasi kebijakan yaitu sebuah proses yang umum pada tindakan administrasi dan dapat diteliti pada program tertentu.

Salah satu tahapan yang krusial pada proses kebijakan publik adalah implementasi. Setelah kebijakan maupun program dipilih, selanjutnya kebijakan atau program tersebut harus dilaksanakan supaya memberikan pengaruh dan dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan secara luas dimaknai sebagai suatu alat administrasi publik dimana para aktor kebijakan, organisasi, prosedur, teknik dan sumber daya yang ada di dalamnya secara bersamaan diorganisasikan untuk melaksanakan kebijakan publik dan mencapai tujuan (B. Sore, 2017:78).

1.5.5.2 Faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Studi mengenai implementasi kebijakan telah masuk pada generasi yang ke tiga, sedangkan pada generasi yang pertama diperkenalkan pendekatan *top down*. Pendekatan tersebut menilai sejauh manakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yang disesuaikan dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan yang berada di tingkat pusat. Berikut adalah beberapa pendekatan *top down* implementasi kebijakan menurut ahli yang dikemukakan oleh Agustino dalam Sawir (2021:171-177), yaitu:

1. Model Donald van Metter dan Carl van Horn (1975)-A Model of The Policy.

Pada model ini dijelaskan bahwa implementasi merupakan suatu bentuk konsep pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan tujuan mencapai kinerja implementasi yang tinggi dan berlangsung pada banyak variabel. Menurut model ini, implementasi kebijakan berjalan segaris antara kebijakan atau keputusan

publik, para implementor, dan kinerja kebijakan publik. Van Metter dan Van Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan publik, yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan dari kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Karakteristik para pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi organisasi dan aktivitas para pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

2. Model George C. Edward III (1980)-*Direct and Indirect Impact of Implementation*

Berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut teori George C. Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, antara lain:

a) Komunikasi

Berhasilnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi. Implementasi dapat dikatakan efektif jika pembuat keputusan kebijakan telah mengerti apa yang mereka lakukan. Komunikasi dijalankan dengan adanya keputusan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang telah ditransmisikan secara tepat kepada personalia. Tujuan dari komunikasi adalah adanya konsistensi dari para pelaksana kebijakan yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan dan kelompok sasaran dari implementasi kebijakan harus ditransmisikan. Dengan demikian akan membantu mengurangi adanya distorsi. Apabila suatu kebijakan tidak memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atau bahkan tidak ada yang mengetahui maka dapat menimbulkan resistensi dari kelompok yang menjadi target atau sasaran (George Edwards III dalam Subarsono (2005, hal. 90).

Edward III mengemukakan bahwa dalam mengukur keberhasilan komunikasi terdapat tiga indikator yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Transmisi, apabila penyaluran komunikasi dilakukan dengan baik maka implementasi juga dapat berjalan baik. Di dalam pelaksanaannya seringkali terjadi miskomunikasi yang dikarenakan komunikasi yang disampaikan sudah melalui beberapa tingkatan birokrasi. Oleh sebab itu, terjadilah distorsi.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang disalurkan hendaknya jelas dan tidak membuat bingung para pelaksana kebijakan. Pada tataran tertentu, ketidakjelasan pesan pada sebuah kebijakan tidak selalu menjadi penghalang dalam implementasi. Akan tetapi, adanya kejelasan dibutuhkan oleh para pelaksana kebijakan supaya tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan konten pada kebijakan.
- 3) Konsistensi, di dalam komunikasi perintah yang disampaikan harus konsisten untuk dijalankan. Apabila perintah-perintah yang disampaikan sering mengalami perubahan maka para pelaksana kebijakan akan merasa kebingungan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

b) Sumber daya

Walaupun komunikasi pada kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik, namun jika sumber daya implementor sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut kurang maka implementasi tidak dapat berjalan dengan baik. Di dalam implementasi, sumber daya dapat berupa staf, informasi, wewenang dan fasilitas fisik. Terdapat beberapa indikator di dalam faktor sumberdaya, yaitu:

- 1) Staf, pada implementasi sebuah kebijakan staf menjadi sumberdaya utama. Salah satu penyebab gagalnya implementasi kebijakan adalah kurangnya staf, staf yang tidak memadai serta tidak memiliki kompetensi pada bidangnya. Meskipun jumlah implementor ditambah, hal tersebut tidak akan mencukupi jika implementor tersebut tidak ahli atau tidak mampu untuk melaksanakan kebijakan atau tugas-tugas dari kebijakan.
- 2) Informasi, informasi pada implementasi kebijakan dikategorikan menjadi 2 bentuk, antara lain:
 - a) Informasi yang berkaitan dengan tata cara dalam pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana diharuskan untuk mengetahui tindakan yang diambil ketika mendapatkan perintah-perintah.
 - b) Informasi yang berkaitan dengan data kepatuhan dari pelaksana kebijakan atas regulasi atau peraturan yang ditetapkan. Dalam hal ini, implementor diharuskan untuk mengetahui apakah orang-orang yang terlibat telah patuh terhadap hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

- 3) Wewenang, agar perintah-perintah yang disampaikan dapat terlaksana maka kewenangan harus bersifat formal. Kewenangan diartikan sebagai legitimasi atau otoritas yang telah ditetapkan secara politik bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Proses implementasi dapat gagal ketika wewenang tersebut nihil yang menyebabkan kekuatan dari para pelaksana tidak terlegitimasi di mata publik. Namun, pada konteks lain apabila terdapat wewenang yang bersifat formal maka seringkali terjadi kesalahan di dalam melihat efektifitas kewenangan. Pada satu sisi, dalam implementasi kebijakan dibutuhkan efektifitas kewenangan. Akan tetapi, pada sisi lain efektifitas kewenangan dapat mengalami penyurutan jika pelaksana kebijakan menyelewengkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- 4) Fasilitas, faktor penting lainnya di dalam implementasi kebijakan adalah adanya fasilitas fisik. Meskipun staf yang ada telah mencukupi dan memiliki pengetahuan tentang apa yang harus mereka kerjakan serta memiliki wewenang dalam menjalankan tugas, namun jika tidak ada fasilitas penunjang seperti sarana prasarana yang baik maka implementasi kebijakan atau program tidak akan berhasil.

c) Disposisi

Disposisi yaitu sikap atau kecenderungan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Selain memiliki pengetahuan tentang tindakan apa yang dilakukan,

pelaksana kebijakan diharuskan memiliki sikap dan kemampuan. Dengan demikian, pada prakteknya di lapangan tidak menimbulkan bias.

Dalam variabel disposisi ini terdapat tiga indikator yang penting untuk dicermati yaitu:

- 1) Efek disposisi, timbulnya hambatan di dalam implementasi disebabkan oleh para personil yang tidak melaksanakan kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pejabat tinggi. Oleh sebab itu, para personil yang dipilih dan diangkat haruslah berdedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama untuk kepentingan warga.
 - 2) Pengaturan birokrasi, hal tersebut berkaitan dengan penunjukan yang diikuti dengan pengangkatan staf yang memiliki kemampuan, kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki.
 - 3) Insentif, adanya tambahan keuntungan maupun biaya tertentu bagi para pelaksana kebijakan dengan tujuan mendorong para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang telah diperintahkan dengan sebaik-baiknya. Insentif tersebut sebagai upaya dalam pemenuhan kepentingan pribadi maupun organisasi.
- d) Struktur Birokrasi

Meskipun sumberdaya di dalam melaksanakan kebijakan telah ada, memiliki pengetahuan dan keinginan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak berhasil dikarenakan struktur birokrasi yang lemah. Kompleksnya kebijakan mengharuskan adanya kerja sama dari orang banyak dalam pelaksanaannya. Jika

struktur birokrasi pada implementasi tidak kondusif, yang terjadi adalah sumber daya tidak efektif juga tidak memiliki motivasi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat terhambat. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi diharuskan untuk mendukung kebijakan dengan cara melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya.

Terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai faktor struktur birokrasi atau organisasi, yaitu:

- 1) *Standart Operational Procedures (SOPs)*, yaitu suatu prosedur atau pedoman yang telah terencana secara rutin dan memungkinkan bagi para pelaksana untuk menjalankan rangkaian kegiatan yang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan.
- 2) *Fragmentasi Organisasi*, tujuan dari fragmentasi organisasi adalah tersebarnya tanggung jawab dari dari program atau kegiatan yang disesuaikan dengan bidang masing-masing. Implementasi dapat berjalan secara efektif apabila struktur organisasi telah terfragmentasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi berkompeten dan juga kapabel.

3. Model Merilee S. Grindle (1980)-*Implementation is a Political and Administrative Process*

Grindle menyebutkan bahwa dalam rangka mengetahui keberhasilan atau kegagalan pada implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap proses pencapaian *outcome*, yaitu melihat apakah

tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan tercapai atau tidak. Hal tersebut ditunjukkan dengan dua hal, yaitu:

- a) Prosesnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan mempertanyakan apakah kebijakan publik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Tercapainya tujuan dalam pelaksanaan kebijakan, hal tersebut dilihat dari dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu:
 - 1) Impak atau dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat baik secara individu maupun secara berkelompok;
 - 2) Seberapa besar perubahan yang telah terjadi dan juga adanya penerimaan dari target maupun kelompok sasaran.

4. Model Daniel H. Mazmanian dan Paul. A. Sabatier (1983)-A *Framework for Policy Implementation Analysis*

Model ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan memiliki peran yang penting yaitu kemampuannya untuk melakukan identifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan formal di dalam proses implementasi secara keseluruhan. Adapun variabel-variabel tersebut antara lain:

- a) Tingkat kemudahan atau kesukaran permasalahan yang akan dikerjakan
- b) Tingkat perubahan yang dikehendaki serta ruang lingkupnya
- c) Kemampuan yang dimiliki oleh kebijakan dalam menstruktur implementasi dengan tepat

- d) Variabel-variabel lain yang berasal dari luar undang-undang dan berpengaruh terhadap proses implementasi.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori dari George C. Edwards III (1980) dimana di dalam implementasi sebuah program dilihat dari empat faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.5.6 Konsep Sampah

1.5.6.1 Pengertian Sampah

Menurut Soemirat Slamet yang dikutip oleh Irmawan et al., (2019) sampah merupakan segala sesuatu yang tidak diinginkan lagi oleh pemilik dan bersifat padat. Ia mengemukakan bahwa ada dua jenis sampah yakni sampah yang mudah untuk membusuk dan sampah yang sulit untuk membusuk. Sampah mudah membusuk, terdiri dari zat organik misalnya sisa daging, sayuran, dsb. Sedangkan sampah yang sulit untuk membusuk misalnya sampah jenis plastik, jenis karet, jenis logam, jenis kayu, jenis kertas, abu sisa pembakaran, dan lain sebagainya.

Kemudian World Health Organization (WHO) mengemukakan pengertian sampah yaitu sampah sebagai suatu materi yang tidak digunakan lagi, tidak dipakai, tidak disenangi ataupun sesuatu yang dibuang dan berasal dari kegiatan manusia sehari-hari dan tidak terjadi dengan sendiri (Chandra dalam Sari, Resmawan & Alaydrus (2018). Ecolink dalam Budiono memberikan definisi sampah sebagai bahan yang dibuang atau terbuang dari kegiatan manusia sehari-hari ataupun karena

proses alamiah dan belum memiliki nilai ekonomis (Anggun Brilian, Nafakhatus Sakhariyyah Hasna, 2020:4).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian sampah yaitu segala sesuatu yang sudah tidak diinginkan lagi, sesuatu yang dibuang dan berasal dari aktivitas sehari-hari manusia maupun dikarenakan proses alam.

1.5.6.2 Jenis-jenis Sampah

Menurut Hadiwiyoto dalam Rutunuwu dan Prince Charles Heston (2020:6-7) sampah dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria, antara lain: berdasarkan asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadi, sifat dan jenisnya.

- 1) Sampah berdasarkan asal
 - a. Sampah berasal dari aktivitas sehari-hari rumah tangga termasuk asrama, hotel, rumah sakit dan perkantoran
 - b. Sampah yang berasal dari kawasan industri atau pabrik
 - c. Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian meliputi pekebunan, hutan, perikanan dan peternakan
 - d. Sampah yang berasal dari aktivitas perdagangan, seperti sampah yang dihasilkan oleh toko-toko
 - e. Sampah yang berasal dari aktivitas pembangunan
 - f. Sampah dari jalan raya
- 2) Sampah berdasarkan komposisinya
 - a. Sampah yang seragam, sampah ini pada umumnya berasal dari kegiatan industri maupun perkantoran

- b. Sampah yang tidak seragam, sampah ini pada umumnya berasal dari aktivitas di pasar atau tempat umum
- 3) Sampah berdasarkan bentuknya
- a. Sampah padat, sampah yang berbentuk padat misalnya dedaunan, kertas, karton, kaleng bekas, dan plastik
 - b. Sampah cair, sampah yang berbentuk cair misalnya air bekas cucian, cairan yang tumpah, limbah dari kegiatan industri
 - c. Sampah gas, sampah yang berbentuk gas misalnya karbondioksida, ammonia, dan gas-gas lainnya
- 4) Sampah berdasarkan lokasi
- a. Sampah yang berasal dari kota kota besar
 - b. Sampah yang berasal dari luar kota seperti daerah pedesaan, pemukiman penduduk, dan pantai
- 5) Sampah berdasarkan proses terjadinya
- a. Sampah alami, yakni berasal dari proses alami seperti gugurnya dadun-daun di pekarangan rumah
 - b. Sampah nonalami, yakni berasal dari kegiatan sehari-hari manusia
- 6) Sampah berdasarkan sifatnya
- a. Sampah organik, merupakan jenis sampah yang terdiri dari dedaunan, kayu, kertas, tulang-tulang, sisa makanan, buah, sayuran. Sampah-sampah tersebut mengandung senyawa organik yang tersusun dari unsur karbondioksida dan oksigen yang mudah terurai oleh mikroba

- b. Sampah anorganik, merupakan jenis sampah yang terdiri dari kaleng dan logam lain seperti mika, gelas, serta sampah yang tidak tersusun dari senyawa organik. Sampah jenis anorganik tidak dapat terurai oleh mikroba.

7) Sampah berdasarkan jenisnya

- a. Sampah makanan, sampah ini berasal dari sisa makanan termasuk sisa makanan dari hewan ternak. Selain itu jenis sampah dapat dibedakan menjadi sampah kebun, sampah kertas, sampah plastik termasuk karet dan kulit, sampah kayu, sampah logam, sampah gelas dan keramik, serta sampah yang berupa debu dan abu.

1.5.7 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan pengurangan dan penanganan pada sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh serta berkesinambungan (Undang-Undang Republik Indonesia 2008). Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas, seperti asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Tujuan dari kegiatan pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, kualitas lingkungan. Selain itu, sampah juga dapat dijadikan sebagai sumber daya.

Pada undang-undang tersebut di atas dijelaskan mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah yaitu: pembatasan timbulan sampah; pendauran

ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah dilaksanakan dengan cara pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir sampah.

Menurut Suyono dan Budiman dalam Yadi Hartono, Dwi Mardhia, Ieke Wulan Ayu (2020:37) pengelolaan sampah adalah kegiatan untuk mengendalikan sampah yang dimulai dari penyimpanan dan pengumpulan sampah sementara, pengangkutan sampah untuk dilakukan pengolahan hingga pada tahap pembuangan akhir yang berdasarkan pada prinsip kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan pada pengelolaan sampah mencakup manajemen, administrasi, aspek legal, kontribusi dari masyarakat, dan teknologi yang digunakan. Pengelolaan sampah yang dilakukan memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomis, politis, antropologis atau sosiologis, topografis atau geografis, *landscape*, demografis, *city planning*, AMDAL, dan ekologi.SNI

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pengelolaan sampah yaitu suatu aktivitas yang dilakukan guna melakukan pengurangan serta penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah, pengangkutan sampah hingga pada proses pengolahan sampah serta dilakukan dengan prinsip kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Implementasi program desa dalam pengelolaan sampah merupakan suatu pencapaian pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masalah lingkungan yaitu pengelolaan

sampah. Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mendeskripsikan implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dengan menggunakan 4 faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program. Pada penelitian ini fenomena yang akan dilihat yaitu:

1.6.1 Implementasi Program Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

Implementasi kebijakan atau program merupakan suatu tindakan yang dipilih oleh pemerintah melalui sebuah keputusan dalam rangka memberikan pengaruh dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Fenomena penelitian yang diamati pada penelitian ini berdasarkan Peraturan Desa Butuh Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Kesehatan Lingkungan. Pada bab kebersihan lingkungan telah diatur mengenai pengelolaan sampah, yaitu:

1. Sampah/limbah pengelolaan rumah tangga
2. Pengamanan sampah rumah tangga dengan melakukan pengolahan sampah di rumah tangga yang mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang;
3. Pengolahan sampah/kotoran dengan cara pemilahan, memasukkan pada tempat sampah dan mengolah sampah sampah dari sumber;
4. Penyediaan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah; dan
5. Larangan membuang sampah/ kotoran secara sembarangan.

1.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George C. Edward III yang digunakan untuk membahas implementasi program yang diteliti. Teori tersebut mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator untuk mempermudah peneliti dalam mengamati fenomena di lapangan. Faktor-faktor dan indikator-indikator tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Komunikasi, yaitu adanya *transmission* (transmisi), *clarity* (kejelasan) tujuan dan sasaran serta *consistency* (konsistensi) dari implementor yang mendukung implementasi program Desa Butuh dalam pengelolaan sampah. Adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu:
 - a. Adanya keputusan dan surat perintah dari pemerintah desa tentang pengelolaan sampah.
 - b. Adanya kejelasan tujuan dan ketepatan target/ sasaran dari program yang dibuat oleh pemerintah desa.
 - c. Adanya konsistensi perintah yang diberikan kepada para pelaksana program desa.
2. Sumber Daya, yaitu berupa *staff* (orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan), *information* (informasi), *authority* (kewenangan), dan *facilities* (fasilitas). Adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu:

- a. Terdapat staf yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan dalam mengelola sampah di desa.
 - b. Adanya informasi tentang pelaksanaan program desa dan informasi mengenai kepatuhan dari orang lain terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Adanya kewenangan dari pemerintah desa (kepala desa) sebagai pelaksana program pengelolaan sampah di desa.
 - d. Terdapat fasilitas-fasilitas dalam pelaksanaan program desa.
3. Disposisi, yaitu berupa sikap atau karakteristik dari para pelaksana program desa dalam pengelolaan sampah seperti efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu:
- a. Terdapat efek disposisi berupa personil yang berdedikasi terhadap kebijakan yang ditetapkan.
 - b. Terdapat staf yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki.
 - c. Insentif bagi pelaksana kebijakan (pengelola sampah desa)
4. Struktur Birokrasi, yaitu adanya *Standart Operating Procedur* (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan program dan fragmentasi organisasi pemerintah desa. Adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu:
- a. Adanya *Standart Operating Procedur* (SOP) atau pedoman dalam pengelolaan sampah di desa.
 - b. Adanya fragmentasi organisasi pemerintah desa.

1.7 Argumen Penelitian

Peneliti memilih implementasi program desa dalam pengelolaan sampah dikarenakan adanya aktivitas pembangunan ekonomi yang meningkat di desa diikuti dengan jumlah penduduk desa yang bertambah sehingga volume sampah juga meningkat setiap harinya, namun pengelolaan sampah yang dilaksanakan di desa belum berjalan dengan optimal dan masih menggunakan paradigma lama. Hal tersebut menjadi tuntutan bagi pemerintah desa (kepala desa) dan pengelola sampah dalam menjalankan program yang telah disusun dan diatur di dalam peraturan desa. Dalam pelaksanaan program perlu diperhatikan dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi oleh pelaksana yaitu kepala desa dan pengelola sampah. Program desa belum berjalan optimal dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jika tata kelola sampah mengikut pada kebijakan/ program yang ada maka pengelolaan sampah dapat optimal dan tidak menimbulkan permasalahan baik bagi lingkungan maupun masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diamati dan tujuan yang akan dicapai, tipe penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti tergolong deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan fenomena penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang dinilai paham terhadap permasalahan penelitian, observasi pada objek penelitian serta dokumentasi untuk mendapatkan data-data mendalam mengenai implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali serta faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yaitu tempat dimana peneliti mendapatkan berbagai data dan informasi dari sumber yang sesuai dengan kebutuhan. Penentuan situs penelitian bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan mengenai lokasi yang menjadi target penelitian. Pada penelitian ini, situs yang dipilih peneliti adalah Desa Butuh tepatnya di Balai Desa Butuh, Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Dusun 1, dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS-3R) di Dusun 2. Dipilihnya situs penelitian tersebut adalah untuk mempermudah mendapatkan data-data atau informasi dari informan terkait pelaksanaan program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subyek atau informan yang diambil pada penelitian ini adalah orang-orang yang dinilai paham dan dapat memberikan data-data serta informasi kepada peneliti tentang fenomena yang diteliti. Data-data dan informasi yang diterima peneliti berupa data primer melalui wawancara dengan para informan menggunakan pedoman wawancara dan direkam menggunakan *smartphone*. Hasil wawancara kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan (transkrip wawancara). Berikut ini adalah nama dan jabatan yang menjadi informan penelitian, yaitu:

Tabel 1.4 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Kepala Desa Butuh	Informan implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh
2.	Pengelola Sampah Desa Butuh (Dusun 1)	Informan implementasi program desa dalam pengelolaan sampah khususnya di Dusun 1, Desa Butuh
3.	Pengelola Sampah Desa Butuh (Dusun 2)	Informan implementasi program desa dalam pengelolaan sampah sampah khususnya di Dusun 2, Desa Butuh
4.	Ketua RT	Informan implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh
5.	Masyarakat Pelaku Usaha	Informan implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh
6.	Masyarakat	Informan implementasi program desa dalam pengelolaan sampah sampah
7.	Masyarakat	khususnya di Dusun 1, Desa Butuh
8.	Masyarakat	Informan implementasi program desa dalam pengelolaan sampah sampah
9.	Masyarakat	khususnya di Dusun 2, Desa Butuh

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau deskripsi kalimat. Data ini dibuat dengan menggunakan nomor, data kualitatif dapat dicari dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Data kualitatif diperoleh dan dikumpulkan peneliti berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan, observasi pada objek penelitian dan melampirkan foto-foto hasil pengamatan di lapangan.

1.8.5 Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data atau informasi yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti di lapangan secara langsung. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada para informan menggunakan panduan wawancara. Hasil wawancara yang telah didapatkan kemudian dituangkan dalam bentuk transkrip.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data atau informasi yang didapatkan dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh peneliti dengan melihat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Butuh. Selain itu, juga infografis seperti tabel, gambar yang peneliti peroleh dari internet. Kemudian buku-buku baik berbentuk fisik maupun *e-book*, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peraturan undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkaya sumber data primer.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang pertama adalah wawancara. Wawancara atau *interview* yang dilakukan oleh peneliti kepada para

informan adalah wawancara terstruktur, dimana kegiatan wawancara telah disusun rinci atau terstruktur. Saat proses wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara yang sebelumnya telah disusun. Panduan wawancara tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek permasalahan yang diteliti di lapangan.

2) Observasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang berlokasi di Dusun 1 Desa Butuh, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) yang berlokasi di Dusun 2 Desa Butuh dan lokasi di sekitar Desa Butuh. Peneliti menggunakan pedoman observasi yang disusun berdasarkan aspek-aspek permasalahan yang diteliti di lapangan.

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku baik fisik maupun *e-book*, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, foto-foto, dan sebagainya. Saat melakukan penelitian di lapangan peneliti mengambil beberapa foto sebagai dokumentasi peneliti.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu setelah data-data atau informasi yang diperoleh di lapangan dilakukan reduksi data,

setelah itu data-data atau informasi tersebut disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

1) Reduksi data

Data-data atau informasi yang telah diperoleh peneliti di lapangan kemudian dilakukan reduksi data atau disederhanakan. Proses reduksi data dilakukan secara terus menerus oleh peneliti di lapangan selama proses penelitian untuk memperoleh inti dari proses penggalian data. Data-data atau informasi tersebut perlu disederhanakan dan dipastikan bahwa termasuk ke dalam scope penelitian yang dilakukan.

2) Penyajian data

Setelah data-data dan informasi diperoleh peneliti di lapangan dan dilakukan reduksi data (penyederhanaan data), kemudian data-data atau informasi tersebut disajikan. Penyajian data-data atau informasi bertujuan untuk melihat gambaran baik secara menyeluruh maupun hanya pada bagian yang tertentu saja. Penyajian data dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fenomena yang diteliti berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Kesimpulan atau verifikasi

Teknik analisis data yang terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi. Setelah data-data dan informasi direduksi dan disajikan, kemudian data-data atau informasi tersebut ditarik kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dengan cara melakukan perbandingan kesesuaian antara pernyataan yang diungkapkan oleh subyek penelitian dengan makna yang terkandung pada konsep penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Pada penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diartikan proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Ada beberapa jenis triangulasi, antara lain triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Di dalam penelitian ini, triangulasi sumber dipilih oleh peneliti untuk melakukan uji kredibilitas data dengan cara melakukan cek ulang data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.